



ISSN (P) : 2086-4264

ISSN (E) : 2581-2343

Dewan Redaksi Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi

Chife in Editor

Nurlaila MC., S.E., M.Acc., Ak., C.A.,
C.Li., C.Ra
(Universitas Islam 45)

Editorial Board

Intan Immanuella, SE.,M.SA
(Universitas Katolik Widya Mandala)

Vita Aprilina, SE.,M.Si.,AK.,CA
Yuha Nadhirah Q., S.E., M.Ak.
(Universitas Islam 45)

Reviewers

Prof.Dr. M. Nizarul Alim,
SE.,M.Si.,CA.
Univeristas Trunojoyo, Madura

Ihsan Nasihin, S.Ak., M.Ak.
(Universitas Buana Perjuangan
Karawang)

Prof. Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah,
SE.,M.S. Ak.
Univeristas Padjajaran

Gafar Hafiz Sagala, S.Pd.,M.Sc
Universitas Negeri Medan

Dr. Sugiyarti Fatma Laela, M. Buss. Acc.
CMA,
Institut Tazkia

Andi Manggala Putra, SE., M.Sc.
Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jakarta

Dr. Icuk Rangga Bawono,
SH.,SE.,M.Si.,MH.,Ak.,CA
Univeristas Jendral Soedirman

Mohammad Iqbal Firdaus, SE., M.Ak.
Universitas Negeri Malang

Ahalik,
SE.,Ak.,M.Si.,Ak.,CMA.,CPMA.,CPSA
K.,DipIFR.,CPA.,CACP.,ACPA.,CA
Sekolah Tinggi Manajemen PPM

Purnama Putra, SE.,M.Si
Universitas Islam 45, Indonesia

Hadi Mahmudah, SE.,M.Sc
Universitas Islam 45, Indonesia

Kantor Redaksi

Gedung D, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam "45" Bekasi. Jl. Cut Meutia No.83
Bekasi. 17113. Telp/fax. (021) 88349033 (Direct); (021) 8808850 (Hunting), Ext. 130:
Fax. (021)8801192

Website: <http://jurnal.unismabekasi.ac.id/>; Email: jrak@unismabekasi.ac.id atau
jrakunisma@gmail.com

Implementasi *Good Corporate Governance* terhadap Nilai Perusahaan Melalui Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

¹ Sura Klaudia

² Parawiyati

³ Harmono

¹ STIE Kesuma Negara

^{2,3} Universitas Merdeka Malang

¹ klaudia@stieken.ac.id

² parawiyati@unmer.ac.id

³ harmono@unmer.ac.id

ABSTRAK

Penerapan dan penegakan *good corporate governance* dikalangan perusahaan BUMN semakin giat dilakukan oleh pemerintah saat ini. Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh *good corporate governance* pada nilai perusahaan melalui pengungkapan *corporate social responsibility* yang berfokus pada perusahaan BUMN, karena BUMN merupakan perusahaan milik pemerintah yang telah memiliki aturan dalam UU untuk menerapkan *good corporate governance* dan melaksanakan *corporate social responsibility*. Proksi *good corporate governance* menggunakan kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit. Jenis penelitian ini merupakan kuantitatif dengan mengambil sampel berupa data sekunder dari BEI. Sampel penelitian sejumlah 11 perusahaan BUMN yang terpilih selama tahun 2015-2018 menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Analisis *Path* digunakan sebagai metode dalam penyelesaian penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya komisaris independen yang tidak memiliki pengaruh terhadap seluruh variabel. Hal ini berarti keberadaan komisaris independen dalam perusahaan BUMN tidak menjadi tolak ukur dalam naik turunnya nilai perusahaan. Pemberian sumbangsih ide ataupun solusi terkait CSR dan tata kelola perusahaan yang baik pada nilai perusahaan dapat digunakan untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan serta peningkatan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Kata kunci: kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, harga saham, *corporate social responsibility*

ABSTRACT

The implementation and enforcement of good corporate governance among BUMN companies is increasingly being carried out by the government at this time. This study examines the effect of good corporate governance on firm value through disclosure of corporate social responsibility that focuses on state-owned companies, because BUMN are government-owned companies that already have rules in the law to implement good corporate governance and implement corporate social responsibility. Good corporate governance proxies use government ownership, managerial ownership, independent commissioners and audit committees. This type of research is quantitative by taking samples in the form of secondary data from the IDX. The research sample was 11 BUMN companies selected during 2015-2018 using purposive sampling technique. Path analysis is used as a method in completing this research. The results showed that only the independent commissioner had no influence on all variables. This means that the existence of independent commissioners in state-owned companies is not a benchmark in the fluctuations in the value of the company. Contribution of ideas or solutions related to CSR and good corporate governance on company values can be used to consider decision making and increase awareness of the surrounding environment.

PENDAHULUAN

Perusahaan BUMN di Indonesia dari tahun ke tahun berkembang semakin pesat. Dikutip dari *website* resmi BUMN, pertumbuhan BUMN tahun 2020 menurun dari tahun sebelumnya sebesar 5,3%, tahun 2019 mengalami peningkatan jumlah yang cukup tinggi dibandingkan tahun 2018 sebesar 6,3%, sedangkan tahun 2015 hingga tahun 2018 jumlah BUMN sama sekali tidak mengalami peningkatan. Upaya bersih-bersih BUMN selalu gencar dilakukan oleh Menteri BUMN. Peningkatan performa BUMN selalu dituntut oleh menteri BUMN. Memiliki slogan berbakti untuk negeri, menjadi motto BUMN untuk berkarya dan berkembang demi kemajuan negara serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Bermodalkan kekayaan negara, BUMN akan terus dipantau dan di soroti oleh pemerintah. Hal ini disebabkan sumber pendanaan BUMN sebagian besar berasal dari negara, sehingga sumber permodalan inilah yang membedakan BUMN dengan badan usaha lainnya.

Munculnya indeks baru di IDX yang berisikan 20 BUMN menandakan ketertarikan investor terhadap saham saham BUMN terbaca oleh IDX. Hal ini menandakan BUMN menjadi lirik investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan BUMN. Ketertarikan tersebut membuat harga saham BUMN meningkat dengan banyaknya minat investor terhadap perusahaan BUMN. Harga saham yang tinggi selain banyak investor yang tertarik juga menandakan kinerja perusahaan yang baik. Hal ini didukung dengan hasil penelitian dari Wior et al. (2017) bahwa kinerja BUMN berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang di ukur dengan harga saham.

UU No 40 tahun 2007 menyebutkan bahwa perseroan terbatas yang bergerak dalam pengelolaan SDM, maka wajib untuk mengeluarkan *corporate social responsibility*. Indonesia memiliki ISO 26000 yang berisikan panduan tanggung jawab sosial yang diterbitkan 1 November 2010 (Mardikanto,2014). Aturan terkait *corporate social responsibility* sudah jelas dan tegas tertuang dalam undang undang, tetapi praktik dan pemahaman bertolak belakang. Pelaksanaan *corporate social responsibility* sudah jelas dalam aturan, tapi asumsi *corporate social responsibility* hanya bersifat sukarela juga masih banyak tersebar dikalangan perusahaan besar. Padahal justru peran *corporate social responsibility* bagi perusahaan sangat besar terutama untuk menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat dan lingkungan. Keseharian perusahaan pastinya tidak lepas dari masyarakat dan lingkungan. Adanya perusahaan BUMN terutama juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan BUMN juga setiap hari bersinggungan dengan masyarakat dan lingkungan. Penelitian Wibowo (2010) menjelaskan pelaksanaan *corporate social responsibility* yang masih sangat minim dilaksanakan oleh perusahaan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kasus seperti lumpur lapindo di Porong Sidoarjo lalu konflik masyarakat Papua dengan PT Freeport. Kontribusi BUMN melalui *corporate social responsibility* adalah suatu bentuk interaksi atau *feedback* BUMN kepada masyarakat. Grace (2012) menyatakan bahwa masyarakat dan pemegang saham memberikan dampak tidak langsung bahkan langsung terhadap aktivitas perusahaan.

Sura Klaudia, Parawiyati & Harmono
 JRAK Vol.13 No.1 Tahun 2022

Penerapan dan penegakan *good corporate governance* dikalangan perusahaan BUMN semakin giat dilakukan oleh pemerintah saat ini. Semenjak digantinya Menteri BUMN yang baru, telah banyak gebrakan pembenahan terhadap tata kelola BUMN. Munculnya surat edaran nomor SE-9/MBU/12/2019 yang menyebutkan bahwa Penerapan Etika dan atau Kepatuhan dalam rangka pengurusan dan pengawasan perusahaan. Surat edaran tersebut menjelaskan bahwa pemimpin perusahaan BUMN harus memiliki etika atau akhlak baik yang menandakan pemimpin tersebut memiliki integritas yang tinggi dan komitmen yang kuat. Penegakan akhlak yang baik tersebut diwujudkan dalam pengimplementasian *good corporate governance*. Permasalahan yang terjadi didalam perusahaan BUMN tersebut tidak akan muncul apabila jajaran pimpinan BUMN menegakkan *good corporate governance*.

Implementasi *good corporate governance* memerlukan beberapa lembaga sebagai pihak pengawas, penilai dan melakukan evaluasi didalam pelaksanaan *good corporate governance*, seperti komisariss independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan institusional. Maureen dan Indah (2017) menyatakan bahwa mekanisme yang berperan penting didalam implementasi *good corporate governance* ialah struktur kepemilikan dan komite audit. Keyakinan penelitian tersebut perlu di uji dengan pengaruh struktur kepemilikan pemerintah dalam perusahaan BUMN. Perusahaan BUMN mendapat pengawasan langsung dari pemerintah melalui kepemilikan saham oleh pemerintah. Pengawasan tersebut seharusnya dapat menghemat pemborosan yang dilakukan manajemen serta mengawasi penggunaan aset untuk meningkatkan nilai perusahaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory

Suatu prinsipal (investor) yang menyewa individu atau organisasi (agen) untuk melakukan beberapa jasa dan mendelegasikan kewenangan dalam membuat keputusan kepada agen disebut dengan suatu hubungan keagenan (*agency relationship*) yang terjadi antara dua individu atau lebih (Brigham dan Houston, 2010). Darmawati et al (2014) berpendapat bahwa inti dari hubungan keagenan ialah terdapat pemisahan milik antara agen dengan *principal*. Adanya tujuan yang berbeda, akan memicu timbulnya konflik antara pihak-pihak yang memiliki hubungan keagenan. Seperti halnya investor ingin kekayaannya bertambah dan kemakmuran para investor terjamin, namun disisi lain para manajer juga berkeinginan sama yakni meningkatkan kesejahteraan, oleh sebab itu akan terjadi suatu permasalahan pada kepentingan dari investor dan manajer. Hubungan antara investor (prinsipal) dengan agen perlu adanya suatu penengah yang bertujuan memperoleh informasi simetris untuk mendukung pengambilan keputusan secara *fair*, pada konteks ini yang dimaksudkan ialah auditor independen yang menegakkan standar format pelaporan keuangan berbasis nilai akuntansi (Harmono, 2017). Berdasarkan dari adanya asumsi diatas dapat diketahui bahwa permasalahan yang timbul antara agen (manajer) dengan prinsipal (pemegang saham) disebabkan oleh sifat dasar yang dimiliki oleh manusia. Implikasi teori agensi dalam penelitian ini ialah agen (manajer) sebagai pengelola perusahaan bagi para pemegang saham yang akan melakukan tindakan bagi kepentingan diri sendiri dan bukan untuk kepentingan pihak lain.

Stewardship Theory

Teori *stewardship* merupakan bagian dari teori keagenen. Perbedaan kedua teori ini terletak dalam penggambaran situasi. Teori *stewardship* memberikan gambaran bahwa manajemen tidak termotivasi dengan tujuan, melainkan hasil yang mereka dapatkan untuk kepentingan organisasi. Berbeda dengan teori keagenen dimana teori ini menggambarkan agen dengan investor yang memiliki kepentingan masing-masing dalam membesarkan organisasi (Anton,2016).

Harga Saham

Perusahaan yang sudah *go public* nilai perusahaannya terlihat dari harga saham perusahaan tersebut, akan tetapi bagi perusahaan yang belum *go public* nilai perusahaannya terlihat pada saat perusahaan tersebut dijual (Margaretha, 2011:5). Nilai perusahaan merupakan suatu pendapat dari investor terhadap perusahaan yang diprosikan dengan harga saham. Pada saat harga saham tinggi maka nilai perusahaan juga tinggi.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Pengertian *corporate social responsibility* ialah cara perusahaan dalam mengelola proses bisnis agar mendapatkan hasil yang positif untuk masyarakat (Mardikanto, 2014:95). Tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* merupakan satu diantara beberapa tanggungjawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pelaksanaan CSR masih simpang siur antara *voluntary* atau *mandatory*. Istilah tanggung jawab seharusnya wajib dilaksanaka, tetapi harus diakui bahwa kelompok yang menyatakan CSR *mandatory* lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok yang menyatakan CSR bersifat *voluntary*. Makna *voluntary* disini disampaikan oleh perusahaan yang berkomitmen CSR tinggi dan pakar yang sependapat terkait hal tersebut. Hal ini bukan berarti perusahaan semaunya sendiri untuk menjalankan CSR atau tidak, melainkan mereka tidak ingin diikat oleh aturan regulasi. Perusahaan akan menjalankan CSR sesuai himbuan pemerintah, setelah itu secara *voluntary* perusahaan akan menambahkan hal positif yang belum di atur. Pelaksanaan CSR tidak diperuntukkan bagi perusahaan swasta, melainkan perusahaan milik pemerintah atau BUMN juga harus melakukan CSR sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. Pemerintah mewajibkan BUMN untuk menyisihkan laba mereka untuk digunakan dalam kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) (Kartini,2013:44 &111).

Good Corporate Governance (GCG)**Komite Audit**

Merupakan suatu komite yang melakukan perkerjaannya secara professional dan independen, didirikan oleh dewan komisaris dengan tugas membantu serta menguatkan fungsi dari dewan komisaris didalam melakukan pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan penerapan *corporate governance* di perusahaan (Effendi,2016:48).

Komisaris Independen

Fungsi dari komisaris independen ialah sebagai penyeimbang bagi pengambilan keputusan oleh dewan komisaris. Dewan komisaris dipilih bersamaan dengan dewan direksi pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Keberhasilan didalam pelaksanaan GCG dipengaruhi oleh dewan direksi dan dewan komisaris. Demi mewujudkan *good corporate governance*, kepemilikan saham komisaris independen harus memiliki proporsi saham setidaknya 30% dari kepemilikan seluruh komisaris (Effendi 2016:26).

Kepemilikan Institusional

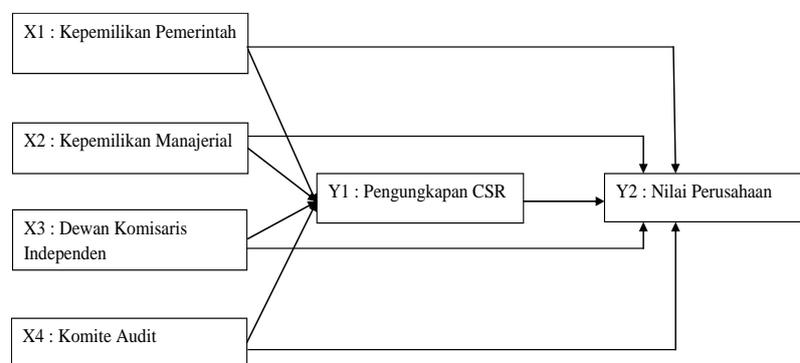
Kepemilikan saham institusional memiliki wewenang yang besar didalam perusahaan. Terutama pemegang saham institusional mayoritas setidaknya memiliki lebih dari 5% saham dibandingkan pemegang saham lainnya (Erida,2011). Pemegang saham institusional bertindak sebagai pengawas perusahaan.

Kepemilikan Manajerial

Pemegang saham yang mempunyai kedudukan di manajemen perusahaan sebagai kreditur atau dewan komisaris (Mutmainah,2015). Apabila manajemen memiliki saham didalam perusahaan tersebut, bisa menjadikan pengawasan bagi perusahaan ketika pengambilan keputusan perusahaan. Setiap pertimbangan didalam pengambilan keputusan akan ditimbang dan dipikirkan sebaik serta terbaik mungkin tanpa ada tujuan terselubung didalam pengambilan keputusan tersebut. Semua dilakukan untuk kepentingan perusahaan semata. Manajer bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan ukuran perusahaan, tetapi pemegang saham bertujuan untuk meningkatkan kekayaan perusahaan.

Struktur kepemilikan menjadi bagian mekanisme yang penting dalam mengukur *good corporate governance*. Selain 2 struktur kepemilikan yang telah dibahas diatas yaitu kepemilikan institusional dan kepemilikan independen, terdapat 2 struktur kepemilikan lainnya yaitu kepemilikan publik dan kepemilikan pemerintah (Hunardy dan Tarigan,2017).

Gambar 1
Kerangka Konseptual



Sumber: Data diolah, 2019

Hipotesis

Penelitian Amran dan Devi (2008) menghasilkan pernyataan dimana dewan pemerintah berkaitan secara positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Malaysia. Keselarasan antara aktivitas pemerintahan dengan kepentingan pemerintah disebabkan oleh adanya kepemilikan saham. Direktur yang ditunjuk oleh perusahaan untuk melakukan keputusan bisnis yang akan digunakan merupakan hak pemerintah untuk kepentingan pemerintahan.

H₁: pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*

Hasil penelitian oleh Widyaningsih (2018) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berhubungan positif terhadap *corporate social responsibility* (CSR). Hal ini dikarenakan tingkat produktifitas perilaku manajer pada suatu perusahaan dipengaruhi oleh besar kecilnya tingkat kepemilikan manajer untuk memaksimalkan nilai perusahaan dalam meningkatkan benefit pemilik perusahaan atau yang disebut dengan manajer. Pengungkapan program CSR akan dilakukan oleh manajer perusahaan agar citra perusahaan meningkat walaupun harus ada sumner daya yang dikorbankan untuk melakukan aktivitas tersebut. Dengan demikian, apabila kepemilikan manajerial tinggi maka dihasilkan pengungkapan CSR juga tinggi.

H₂: pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*

Hasil penelitian dari Dewi dan Nugrahanti (2017) yang menermukan bahwa dewan komisaris berhubungan positif dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hal ini dikarenakan fungsi dan tugas dari dewan komisaris ialah melakukan monitoring terhadap segala upaya dan tindakan yang dilakukan manajemen. Adanya dewan komisaris didalam perusahaan digunakan sebagai bentuk pengendalian internal yang tertinggi. Semakin besar dewan komisaris, maka semakin banyak dan tinggi upaya didalam melakukan pengawasan dan pemberian arahan terhadap manajemen terutama didalam melakukan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

H₃: pengaruh dewan komisaris independen terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*

Taha (2013) yang menghasilkan pengaruh positif komite audit terhadap *Corporrate Social Reesponsibility* (CSR). Alasannya yaitu komite audit digunakan sebagai pengendaliintern dan kualitaslaporan keuangan yang perhatiannya ditujukan pada pengungkapan CSR diperusahaan yang berfungsi sebagai magnet dalam meingkatkan *image* perusahaan. Hal ini dapat menarik banyak investor pemerhati lingkungan dan sosial untuk memberikan sahamnya.

H₄: pengaruh komite audit terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*

Hersugondo (2018) menghasilkan bahwa kepemilikan pemerintah berhubungan positif dengan nilaiperusahaan. Semakin besar jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah di BUMN maka nilai perusahaan akan meningkat. Berada dalam payung pemerintahan membuat BUMN harus mengikutu seluruh aturan dan regulasi pemerintah. Hal tersebut membuat BUMN tunduk dan patuh kepeda aturan pemerintah agar terlihat baik dimata investor dan mampu menaikkan nilai perusahaan.

Sura Klaudia, Parawiyati & Harmono

JRAK Vol.13 No.1 Tahun 2022

H₅: pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap nilai perusahaan

Nurhayati dan Medyawati (2012) berpendapat kepemilikan manajemen berhubungan positif tidaksignifikan dengan nilai perusahaan. Didalam pengurangan konflik pada kepentingan, fungsi dari manajemen yang memiliki saham di perusahaan belum mampu menyelesaikan konflik yang terdapat dalam perusahaan. Berbeda dengan hasil penelitian Susanto dan Subekti (2013) bahwa kepemilikan manajemen memiliki hubungan yang positif terhadap nilai perusahaan, sehingga apabila manajemen memiliki saham yang tinggi didalam perusahaan maka pengaruhnya terhadap nilai perusahaan juga akan tinggi. Penelitian Susanto dan Subekti (2013) mendukung apa yang disebutkan dalam *agency cost* yang timbul karena adanya *agency theory*.

H₆: pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan

Susanto dan Subekti (2013) menghasilkan pada penelitiannya bahwa komite audit memiliki pengaruh yang positif terhadap nilai perusahaan. Komite audit yang merupakan bagian dari anggota komisaris perusahaan maka semakin tinggi jumlah dari komite audit maka berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Adanya komisaris independen akan menyebabkan kurangnya konflik dalam perusahaan.

H₇: pengaruh dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan

Hasil penelitian Olaniran (2012) menyatakan bahwa Komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Pengawasan terhadap laporan keuangan serta penggunaan keuangan didalam perusahaan dilakuka oleh komite audit. Sebagai badan penagwas yang emmiloki peran besar, keberadaan komite aduit berpengaruh tinggi terhadap nilai perusahaan.

H₈: pengaruh komite audit terhadap nilai perusahaan

Nurhayati dan Medyawati (2012) dalam penelitiannya menghasilkan hubungan positif tetapi tidak signifikan antara *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan nilai perusahaan. Perusahaan yang menjalankan CSR belum tentu sesuai dengan harapan dari masyarakat, sehingga ketika diungkakannya CSR maka pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Fridagustina (2014) pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berhubungan positif signifikan dengan nilai perusahaan. Hasil penelitian yang menyatakan bahwa dengan perusahaan mengungkap CSR, maka dapat meningkatkan citra perusahaan.

H₉: pengaruh nilai perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*

Amran dan Devi (2008) menghasilkan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan melalui pengungkapan CSR. Hasil ini menunjukkan bahwa pihak pemerintah bebas dalam mengatur dan menentukan keputusan yang terkait dengan perusahaan yang berdasarkan pada pengungkapan CSR. Hak besar dimiliki oleh pemerintah ketika saham terbesar dimiliki oleh pemerintah.

H₁₀: pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap nilai perusahaan melalui pengungkapan *corporate social responsibility*

Penelitian yang dilakuan oleh Rustiarini (2011) menghasilkan penelitian bahwa terdapat pengaruh positif antara kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan melalui pengungkapan CSR. Kepemilikan manajerial terhadap saham perusahaan yang tinggi,

Sura Klaudia, Parawiyati & Harmono

JRAK Vol.13 No.1 Tahun 2022

maka akan mendorong pihak manajemen untuk mengelola perusahaan secara baik demi mendapat nilai yang tinggi dan didasarkan pada pengungkapan CSR.

H₁₁: Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan melalui pengungkapan *corporate social responsibility*

Said et al (2009) bahwa dewan komisarisindependen berpengaruh positif terhadap NilaiPerusahaan melalui Pengungkapan *CorporateSocial Responsibility* (CSR). Adanya dewan komisarisindependen dalam perusahaan, memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan pengelolaan perusahaan.

H₁₂: Pengaruh dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan melalui pengungkapan *corporate social responsibility*

Servaes dan Tamayo (2013) menghasilkan bahwa banyaknya jumlah dari komite audit yang berada diperusahaan membuat perusahaan selalu mengevaluasi kekurangan serta kesalahan yang dapat merugikan perusahaan serta dapat merugikan masyarakat. Penelitiantersebut menghasilkan adanya pengaruh positif komite audit terhadap nilai perusahaanmelalui pengungkapan CSR.

H₁₃: Pengaruh komite audit terhadap nilai perusahaan melalui pengungkapan *corporate social responsibility*

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri atas variable bebas, yaitu *good corporate governance* (X) yang diprosikan dengan kepemilikan pemerintah (X₁), kepemilikan manajerial (X₂), dewan komisaris independen (X₃) dan komite audit (X₄). Variabel terikat yaitu harga saham dan *Corporate Social Responsibility* sebagai variabel intervening. Sumber sekunder yang digunakan ialah data dari perusahaan BUMN yang publish di IDX selain itu juga mengambil data laporan keberlanjutan yang telah disusun berdasarkan indeks GRI. Total perusahaan yang menjadi sampel penelitian berjumlah 11 perusahaan BUMN dan menghasilkan 44 observasi. Data di oleh menggunakan SPSS versi. 20 dengan melakukan analisis jalur (path analysis).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Diagram Jalur (*Path Diagram*)

Tabel 1
Hasil Parameter Model

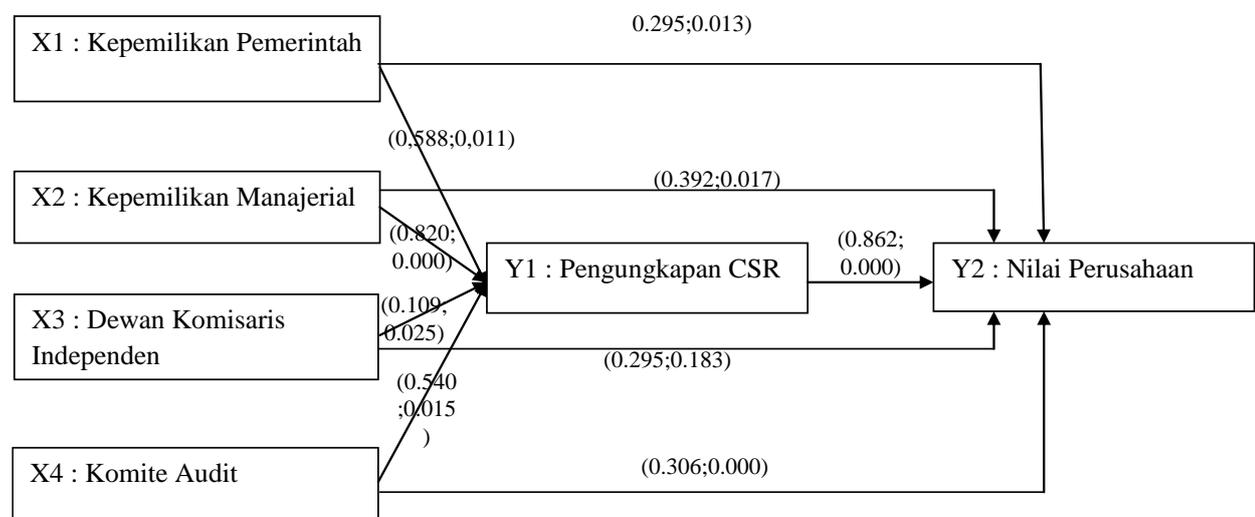
Hasil Uji	Variabel	Beta	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig.	Keterangan
H ₁	X ₁ → Y ₁	0,588	2,698	2,021	0,011	Signifikan
H ₂	X ₂ → Y ₁	0,820	3,777		0,000	Signifikan
H ₃	X ₃ → Y ₁	0,109	2,246		0,025	Signifikan
H ₄	X ₄ → Y ₁	0,540	2,583		0,015	Signifikan
H ₅	X ₁ → Y ₂	0,247	2,600	2,021	0,013	Signifikan
H ₆	X ₂ → Y ₂	0,392	2,529		0,017	Signifikan
H ₇	X ₃ → Y ₂	0,295	1,271		0,183	Tidak Signifikan
H ₈	X ₄ → Y ₂	0,306	3,642		0,000	Signifikan
H ₉	Y ₁ → Y ₂	0,862	4,047		0,000	Signifikan
H ₁₀	X ₁ → Y ₁ → Y ₂	0,588 x 0,862 = 0,507 (0,247 < 0,507)				-

H ₁₁	X ₂ → Y ₁ → Y ₂	0,820 x 0,862 = 0,707 (0,392 < 0,707)	-
H ₁₂	X ₃ → Y ₁ → Y ₂	0,109 x 0,862 = 0,094 (0,295 > 0,094)	-
H ₁₃	X ₄ → Y ₁ → Y ₂	0,540 x 0,862 = 0,465 (0,306 < 0,465)	-

Sumber: Diolah, 2019

Hasil output diatas dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel dengan nilai probabilitas < 0,05. Berdasarkan tabel diatas, dapat dibangun diagram jalur berdasarkan model yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut ini diagram jalur yang dapat disajikan ialah sebagai berikut:

Gambar 2
Diagram Jalur



Sumber : Data Diolah,2019

Hasil diagram jalur diatas menunjukkan seluruh hipotesis memiliki pengaruh, tetapi hanya satu hipotesis yang tidak berpengaruh yaitu Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.

Tabel 2
Uji F

Variabel	F _{hitung}	F _{tabel}	Sig F
X ₁ , X ₂ , X ₃ dan X ₄ → Y ₁	7,205	2,580	0,000
X ₁ , X ₂ , X ₃ , X ₄ dan Y ₁ → Y ₂	6,840		0,000

Sumber : Diolah, 2019

Hasil output diatas memperlihatkan nilai dari uji F yang memberikan hasil bahwa; besarnya nilai dari Fhitung variabel X₁, X₂, X₃ dan X₄ → Y₁ sebesar (7,205) > Ftabel (2,580), sedangkan besarnya nilai signifikan (0,000). Kesimpulan dari uji F ini ialah secara simultan X₁, X₂, X₃ dan X₄ berpengaruh signifikan terhadap (Y₁). Besarnya nilai dari Fhitung variabel X₁, X₂, X₃, X₄ dan Y₁ → Y₂ sebesar (6,840) > Ftabel (2,580), sedangkan besarnya nilai signifikan (0,000). Kesimpulan dari uji F ini ialah yang berarti bahwa secara simultan X₁, X₂, X₃, X₄ dan Y₁ berpengaruh signifikan terhadap (Y₂).

Tabel 3
Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R Square
X ₁ , X ₂ , X ₃ dan X ₄ → Y ₁	0,599
X ₁ , X ₂ , X ₃ , X ₄ dan Y ₁ → Y ₂	0,561

Sumber : Diolah, 2019

Besaran dari nilai R² variabel X₁, X₂, X₃ dan X₄ → Y₁ sebesar 0,599. Kesimpulan yang dapat diambil ialah secara menyeluruh dari variabel X₁, X₂, X₃ dan X₄ berpengaruh terhadap (Y₁) sebanyak 59,9% dan sisanya sebanyak 0,401 atau 40,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Besaran dari nilai R² variabel X₁, X₂, X₃, X₄ dan Y₁ → Y₂ sebesar 0,561. Kesimpulan yang dapat diambil ialah secara menyeluruh dari variabel X₁, X₂, X₃, X₄ dan Y₁ berpengaruh terhadap (Y₂) sebanyak 56,1% dan sisanya sebanyak 0,439 atau 42,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Uji Model Persamaan Struktural

Koefisien determinasi total (Rm²) dapat dicari melalui model persamaan struktural. Output uji model persamaan struktural dinyatakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Rm^2 &= 1 - Pe_1^2 - Pe_2^2 \dots\dots Pe_i^2 \\
 Pe_1 &= \sqrt{1 - R_1^2} = \sqrt{1 - 0,599} = 0,633 \\
 Pe_2 &= \sqrt{1 - R_2^2} = \sqrt{1 - 0,561} = 0,662 \\
 Rm^2 &= 1 - (0,633)^2 - (0,663)^2 \\
 &= 1 - (0,401) - (0,439) \\
 &= 1 - 0,176 \\
 &= 0,824
 \end{aligned}$$

Nilai dari penghitungan uji model persamaan struktural menghasilkan nilai koefisien determinasi total senilai 0,824. Hal ini memperlihatkan banyaknya data yang mampu diterangkan oleh model persamaan struktural yang telah dibuat sebanyak 82,4% atau dapat dikatakan bahwa informasi yang terdapat dalam data mampu diterangkan oleh mode sebanyak 82,4% dan sebanyak 17,6% dijelaskan oleh variabel lainnya yang terdapat dalam model (error).

Pembahasan

Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Corporate Social Responsibility*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap *Corporate Social Responsibility*. Artinya apabila BUMN mengimplementasikan *Good Corporate Governance* maka akan terimplementasi pula *Corporate Social Responsibility*. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada perusahaan BUMN tidak lepas dari dewan komisaris independen yang selalu memberikan pengawasan terhadap kinerja dari direksi agar memberikan yang terbaik baik perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Dewi dan Nugrahanti (2017), Amran dan Devi (2008), Widyaingsih (2018), dan Taha (2013),

Sura Klaudia, Parawiyati & Harmono

JRAK Vol.13 No.1 Tahun 2022

yang menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap *Corporate Social Responsibility*.

Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Nilai Perusahaan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan. Artinya implementasi dari *Good Corporate Governance* akan menaikkan nilai perusahaan BUMN. Hasil ini sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hersugondo (2018) dan Susanto dan Subekti (2013). Dewan komisaris independen yang ditunjukkan dalam penelitian ini justru tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Artinya adanya komisaris independen didalam BUMN tidak mempengaruhi penambahan aset, modal dan tidak mengurangi utang BUMN. Hasil ini sama dengan hasil penelitian Olaniran (2009) bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan tidak sependapat dengan hasil penelitian Rouf (2011) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kesimpulannya *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan untuk proksi kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajerial, dan komite audit.

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan. Artinya implementasi *Corporate Social Responsibility* yang meliputi sosial, ekonomi dan lingkungan dilakukan maka akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan BUMN. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* sampai pada pelaporannya yang dipublikasikan akan mempengaruhi harga saham perusahaan. Hasil ini mendukung hasil penelitian dari Fridagustina (2014) yang menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan dan menolak hasil penelitian dari Nurhayati dan Meydawati (2012) yang menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.

Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Nilai Perusahaan melalui *Corporate Social Responsibility*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan melalui *Corporate Social Responsibility*. Artinya bahwa implementasi *Good Corporate Governance* akan menggiring BUMN untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility* yang hasilnya nanti dapat meningkatkan nilai perusahaan. Indikator kepemilikan manajerial memiliki pengaruh tinggi terhadap meningkatnya nilai perusahaan melalui pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Kepemilikan saham manajerial di perusahaan BUMN akan berdampak besar terhadap pengelolaan BUMN, sebab manajerial merasa memiliki hak dan suara atas BUMN serta akan menjadi dasar bagi manajerial untuk melakukan pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Kepemilikan saham pemerintah di perusahaan BUMN membuat *Corporate Social Responsibility* diungkapkan dengan rinci dan *up to date*. Pengungkapan ini membuat naiknya nilai perusahaan yang ditandai dengan tingginya harga saham BUMN dan lebih diminatnya saham BUMN di kalangan investor yang ditandai dengan dibuatnya indeks BUMN 20 oleh IDX. Adanya kepemilikan saham yang tinggi oleh pemerintah di perusahaan BUMN, membuat pemerintah mudah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMN.

Sura Klaudia, Parawiyati & Harmono
 JRAK Vol.13 No.1 Tahun 2022

Keberadaan komite audit dalam perusahaan BUMN cukup membuat pengaruh bagi pengelolaan BUMN. Adanya komite audit membuat perusahaan BUMN menjadi terawasi dan mengimplementasikan *Good Corporate Governance* yang didasarkan pada pengungkapan *Corporate Social Responsibility* sesuai dengan aturan yang berlaku bagi BUMN. Hal ini ditandai dengan semakin bertambahnya BUMN yang mempublikasikan laporan keuangan serta laporan keberlanjutannya secara berkala.

Berbeda dengan adanya komisaris independen di dalam perusahaan BUMN yang memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan dan tidak berdampak terhadap nilai perusahaan. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan BUMN dengan presentase lebih sedikit dari pada komisaris BUMN sendiri tidak berpengaruh terhadap apapun bagi BUMN. Keberadaan komisaris independen juga tidak membuat *Corporate Social Responsibility* diungkapkan.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam BUMN yang dilakukan dengan baik maka akan semakin luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* meliputi aspek sosial, ekonomi dan lingkungan yang telah memiliki standar dalam pelaksanaan dan pengukurannya. Adanya keluasan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* maka berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Implementasi yang tepat dari *Good Corporate Governance* pada BUMN akan memperluas *Corporate Social Responsibility* maka akan meningkatkan nilai perusahaan. Penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Soedaryono dan Riduifana (2013), Marius dan Masri (2017) yang menunjukkan hasil bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui *Corporate Social Responsibility*.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam BUMN yang dilakukan dengan baik maka akan semakin luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* meliputi aspek sosial, ekonomi dan lingkungan yang telah memiliki standar dalam pelaksanaan dan pengukurannya. Adanya keluasan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* maka berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Implementasi yang tepat dari *Good Corporate Governance* pada BUMN akan memperluas *Corporate Social Responsibility* maka akan meningkatkan nilai perusahaan.

Saran

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini ialah bagi peneliti lain disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan memilah atau memfokuskan pada salah satu jenis sektor perusahaan BUMN yang sama, karena penelitian ini tidak melakukan spesifikasi sektor perusahaan BUMN. Hal ini membuat hasil penelitian dapat dikatakan secara mencakup perusahaan secara global.

DAFTAR PUSTAKA

Anton, 2016, "Menuju Teori Stewardship Manajemen", Majalah Ilmiah Informatika. Vol 1

Sura Klaudia, Parawiyati & Harmono

JRAK Vol.13 No.1 Tahun 2022

Brigham, Eugene F dan J.F. Houston, 2010, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Edisi 11, Salemba Empat, Jakarta.

Bursa Efek Indonesia, 2018, "Laporan Keuangan Tahunan dan Sustainability Report", www.idx.co.id. Diakses pada hari minggu, 7 Oktober 2018 jam 10:22Wior et al. (2017)

Darmawati,et al, 2014, "Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Faktor Regulasi Terhadap Kualitas Implementasi Corporate Governance",Simposium Nasional Akuntansi.

Effendi, Arief, 2016, *The Power Of Good Corporate Governace*, Edisi II, Salemba Empat, Jakarta.

Erida, Gabriella, 2011, "Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro", FE Universitas Diponegoro, Semarang

Grace, Putri,2012, "Pengaruh Struktur Pemegang Saham Terhadap Struktur Modal Perusahaan", *Jurnal Pekbis*, Vol.4 No. 2

Harmono, 2017, *Manajemen Keuangan Berbasis Balance Scorecard*, Bumi Aksara, Jakarta

Hunardy, Yulius Jogi dan Josua Tarigan. 2017. "Pengaruh Kepemilikan Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Melalui Dewan Komisaris Independen Sebagai Variabel Intervening", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 9, No.1

Kartini, Dwi, 2013, *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Mardikanto, Totok, 2014, *CSR (Corporate Social Responsibility)*, Alfabeta, Bandung.

Margaretha, Farah. 2011. *Teori Dan Aplikasi Manajemen Keuangan Investasi dan Sumber Dana Jangka Pendek*. Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta

Mauren, Erma Marius dan Masri Indah, 2017, "Pengaruh GCG Dan CSR Terhadap Nilai Perusahaan", *Konferensi Ilmiah Akuntansi Ke-IV*, Universitas Pancasila FEB, Jakarta.

Mutmainah, 2015, "Analisis Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan", *Jurnal Eksis*, Vol 10 No 2

Pemerintah Indonesia, 1945, "Undang - Undang Dasar Pasal 33", *Lembaran RI Tahun 1945*, Sekretariat Negara, Jakarta

Pemerintah Indonesia, 2007, "Undang - Undang Nomor 40 Tentang Perseroan Terbatas", *Lembaran RI Tahun 2007 No. 40*, Sekretariat Negara, Jakarta

Pemerintah Indonesia, 2019, "Penerapan Etika dan atau Kepatuhan dalam rangka pengurusan dan pengawasan perusahaan",*SE-9/MBU/12/2019*, Kementerian BUMN, Jakarta

Thorton, Deborah, 2009, "Stewardship in Governance Spending", *Policy Study*, No 09

Wibowo, Edi, 2010, "Implementasi Good Corporate Governance di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol 10 No 2

Wilson, Kent, 2010, "Stewardship Leadership:Characteristics of The Steward Leader in Christian Nonprofit Organizations".